



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 112/M.PPN/HK/05/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong implementasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur perkotaan, perlu diberikan fasilitasi penyusunan dokumen penyiapan proyek kepada kementerian/lembaga/kepala daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian fasilitasi penyusunan dokumen penyiapan proyek kepada kementerian/lembaga/kepala daerah perlu dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau dan bertanggungjawab atas tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- membuat jadwal serta rencana kerja Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan;
  - melakukan koordinasi upaya Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan yang mendapatkan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas;
  - melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan;
  - melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan narasumber ahli dan *stakeholders* terkait baik secara internal maupun eksternal;
  - mempersiapkan dan menyusun bahan rapat;
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 112/M.PPN/HK/05/2019  
TANGGAL 31 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber  
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  
Masyarakat, dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan  
Rancang Bangun.
- Wakil Ketua : Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/  
Bappenas.
- Sekretaris : Astu Gagono Kendarto, ST, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang  
Teknologi, Energi, dan Lingkungan  
Perhubungan;  
2. Direktur Industri Kimia Hulu,  
Kementerian Perindustrian;  
3. Asisten Deputi Produktivitas Energi,  
Kemenko Perekonomian;  
4. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian,  
Kementerian Perhubungan;

5. Direktur ...

5. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/ Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/ Bappenas;
8. Susanty Pertiwi, SS, M.Hum, Kementerian Perhubungan;
9. Nursyaf Rullihandia S, ST, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas
11. Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Dadang Jusron, SE, Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/ Bappenas;
14. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST, Kementerian PPN/ Bappenas;
15. Ade Hendraputra, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Theresia Yut Sartaulina Aruan, ST, Kementerian PPN/ Bappenas.

**D. TENAGA PENDUKUNG**

- : 1. Saripudin, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Suwita, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Diah Triastuti, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati